



**DINSOSPMD
WONOSOBO**

RENCANA KINERJA 2027

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



WONOSOBO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini dapat diselesaikan. Dokumen Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional.

Penyusunan Renja PD Tahun 2027 ini merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan daerah, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) Dinsos PMD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini disusun sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Renja Dinsos PMD Tahun 2027 merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Wonosobo, yaitu **"Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur"**. Secara spesifik, Renja ini menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami selama satu tahun anggaran.

Tahun 2027 memiliki fokus pembangunan daerah pada tema **"Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan"**. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja ini diarahkan untuk menjamin konsistensi dengan Renstra Perangkat Daerah, mendukung sasaran daerah, dan mengatasi isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan peningkatan kemandirian desa.

Kami menyadari bahwa Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini masih memerlukan penyempurnaan. Dokumen ini selanjutnya akan dibahas dan diselaraskan dalam Forum Perangkat Daerah. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan yang akuntabel dan terukur bagi seluruh unit kerja di

lingkungan Dinsos PMD, serta menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS, yang pada akhirnya akan mendukung terlaksananya pengendalian dan evaluasi kinerja secara periodik.

Akhir kata, kami berharap Rancangan Awal Renja Dinsos PMD Tahun 2027 ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Wonosobo yang berkelanjutan, efektif, dan berintegritas.

Wonosobo, 20 Juli 2026

Kepala Dinas Sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Wonosobo



Dra. HARTI MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711227 199101 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL *(Opsional: Sesuai kelengkapan dokumen)*

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK *(Opsional: Sesuai kelengkapan dokumen)*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2026)

2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2026

2.2 Analisis Capaian Kinerja dan Faktor Penentu

2.3 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

3.2 Sasaran Strategis Perangkat Daerah

3.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan RPJMD/RKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2027

4.2 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

4.3 Kebutuhan Pendanaan Indikatif (Pagu Indikatif) Tahun 2027

4.4 Prakiraan Maju (Prakiraan Kebutuhan Pendanaan) Tahun 2028

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

BAB I
PENDAHULUAN
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2027

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Pasal 126 ayat (1) bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini merupakan instrumen penting untuk mengoperasionalkan kebijakan tahunan dan memastikan tercapainya sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Renja PD Tahun 2027 disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2026–2029. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja tahunan.

Secara substantif, Renja Tahun 2027 ini dirumuskan dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Wonosobo, yaitu "**Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur**". Renja Dinsos PMD berkontribusi penting, khususnya dalam mendukung Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati, yaitu *Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian dengan Tersedianya Akses Pendidikan dan Kesehatan*.

Tahun 2027 merupakan tahun Tahap Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata, dengan mengusung tema pembangunan daerah Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan. Sesuai arahan kebijakan tahunan dalam Renstra Dinsos PMD, fokus tahun 2027 diarahkan pada Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan desa/kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan akselerasi layanan.

Penyusunan Renja PD juga bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju dengan Renstra Perangkat Daerah. Tujuan utama Dinsos PMD yang didukung melalui Renja 2027 adalah *Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Kelompok Rentan dan Meningkatnya Kemandirian dan Kemajuan Desa*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Gambar Skema 1.1

Gambar Tata Cara Penyusunan Renja



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 berpedoman pada ketentuan dan regulasi perencanaan pembangunan daerah:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024:

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Dinsos PMD Tahun 2027 adalah untuk menyediakan **rancangan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan** yang akan dilaksanakan oleh Dinsos PMD, lengkap dengan kebutuhan pendanaan indikatifnya, sebagai dasar untuk pembahasan dan penyelarasan pada Forum Perangkat Daerah. Sehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur.

Adapun Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;
- b. Untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
- c. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Renja PD Tahun 2027 adalah:

1. **Menjamin konsistensi dan kesesuaian** antara rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dengan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinsos PMD (2026–2029).

2. **Menetapkan rencana kerja dan pendanaan** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang mendukung sasaran daerah, terutama terkait penurunan kemiskinan dan peningkatan kemandirian desa.
3. **Memastikan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru** dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.
4. Menjadi pedoman untuk **penganggaran** serta dasar dalam melakukan **pengendalian dan evaluasi kinerja** Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun Anggaran 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan, hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

b. Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Kabupaten Wonosobo, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, review terhadap rancangan RKPD Tahun 2024 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

c. Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

d. Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

e. Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2027 ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai sejauh mana program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) pada tahun sebelumnya telah mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

2.1. Evaluasi Kinerja Dinsos PMD Tahun 2026 (Proyeksi Capaian)

Evaluasi kinerja Dinsos PMD Tahun 2026 difokuskan pada dua urusan utama yang menjadi kewenangan, yaitu Urusan bidang Sosial dan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan dengan membandingkan realisasi tahun berjalan dengan target kinerja yang ditetapkan, terutama yang selaras dengan Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo: *Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;*

Penyusunan Renja DinsosPMD sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra DinsosPMD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta

hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja DinsosPMD Kabupaten Wonosobo tahun 2027 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2025.

Pada tahun anggaran 2025 DinsosPMD melaksanakan 10 (sepuluh) program, 18 kegiatan, dan 72 sub kegiatan. Rencana Belanja Daerah DinsosPMD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 per November 2025, sebesar Rp. 20.228.291.262,00

Hasil evaluasi/reviu pelaksanaan Renja Dinas sosial PMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2027 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi berdasarkan target Rencana Strategis (Renstra) Sosial PMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Berikut adalah rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d Tahun 2025 bulan November 2025

Nama Perangkat Daerah DinsosPMD Wonosobo
:
Lembar

NO	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keg.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Intermediate outcome)/Sub kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi	Target dan Realisasi Kinerja dan Kegiatan	
									Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025
1	2					3	4	5	6	7	8
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					

[illegible]

	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250 PKT	250 PKT	1 Paket	1 Paket
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 PKT	8 PKT	1 Paket	1 Paket
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 PKT	12 PKT	1 Paket	1 Paket
	1					NON URUSAN					
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					
2	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 Persen	100 Persen
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			100 Persen	100 Persen
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 PKT	12 PKT	12 pkt	12 pkt

	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
3	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 Persen	100 Persen
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum			100 Persen	100 Persen
	1	06	01								
				2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 DOK	12 DOK	1 Dokumen	1 Dokume
	1	06	01								
				2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 LAP	120 LAP	1 Laporan	1 Laporan

	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi belanja pengadaan barang milik daerah			100 Persen	100 Persen
	1	06	01								
				2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 UNIT	20 UNIT	1 Unit	1 Unit
	1	06	01								
				2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 UNIT	12 UNIT	1 Unit	1 Unit
	1	06	01								
				2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit
	1	06	01								
				2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1 Unit	1 Unit
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	100 persen
	1	06	01								
				2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 LAP	12 LAP	1 Laporan	1 Laporan
	1	06	01								

				2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 LAP	12 LAP	1 Laporan	1 Laporan
	1	06	01								
				2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 LAP	12 LAP	1 Laporan	1 Laporan
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	100 persen
	1	06	01								
				2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 UNIT	15 UNIT	1 Unit	1 Unit
	1	06	01								
				2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 UNIT	21 UNIT	1 Unit	1 Unit
	1	06	01								

				2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 UNIT	5 UNIT	1 Unit	1 Unit
4	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri Rasio penerima program usaha produktif laki-laki : perempuan Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi			4,03 50 4,3 persen angka persen	4,03 50 4,3 persen angka persen
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas)			100 keluarga	100 keluarga
	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 KEL	40 KEL	70 Keluarga	70 Keluarga

[illegible]

	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 LEMBAGA	10 LEMBAGA	15 Lembaga	15 Lembaga
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 SERTIFIKAT	2 SERTIFIKAT	2 Sertifikat	2 Sertifika
5	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial			100 77,28 % %	100 77,28 % %

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 ORG	30 ORANG	50 0	50 0
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosia			25 Persen	25 Persen
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 ORANG	30 ORANG	20 Orang	20 Orang
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	25 ORANG	25 ORANG	10 Orang	10 Orang

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 DOK	1 DOK	1 Dokumen	1 Dokumen
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	124 MAKAM	124 MAKAM	130 Makam	130 Makam
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
9	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik			69 persen	69 persen

	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan penyelenggaraan penataan desa			4 dokumen	4 dokumen
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	600 UNIT	600 UNIT	600 Unit	600 Unit
10	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk			24 persen	24 persen
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan Kerjasama Antar Desa yang difasilitasi			19 dokumen	19 dokumen
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 DOK	3 DOK	1 Dokumen	1 Dokumen
	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3 DOK	3 DOK	1 Dokumen	1 Dokumen
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 DOK	2 DOK	1 Dokumen	1 Dokumen

11	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes berbadan hukum Persentase BUMDes berkembang dan maju Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa Persentase desa berkinerja baik			59,46 4,3 6,97 75 % % % %	59,46 4,3 6,97 75 % % % %
----	---	----	----	--	--	---	---	--	--	---	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki Misi dan Visi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu perangkat daerah yang diberikan wewenang dalam menangani pelayanan di bidang sosial dan urusan pembantu lainnya yang kemudian dilaporkan dalam pelaporan kinerja . Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dan hasil reviu dokumen perencanaan dengan Realisasi dan Capaian Kinerja sebagai berikut

Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Wonosobo

Capaian Kinerja Tahun 2025						
No.	Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Kelompok Rentan		Indeks Kesejahteraan Sosial	57,75	57,75	100
		SPD.1.1.3.1.1.- Peningkatan kesejahteraan sosial (DO jumlah layanan kesejahteraan dan bantuan sosial yang diberikan dibagi jumlah DTSEN)	Cakupan Perlindungan dan Penerima Atensi Sosial	23,64	23,64	100
		SPD.1.1.3.1.2. Peningkatan Kemandirian Kelompok Rentan	Persentase Peningkatan Keluarga Miskin dan Rentan yang Tergraduasi	2,80	2,80	100
	Meningkatnya Kemandirian dan Kemajuan Desa		Indeks desa	77,92	77,92	100
		SPD.1.1. Peningkatan Tata Kelola Desa	Indeks kinerja pemerintahan desa (di indeks desa)	81,92	81,92	100

		SPD.1.2. Peningkatan Aksesibilitas Desa	Indeks Aksesibilitas Desa (di Indeks Desa)	88,81	88,81	100
		SPD.1.3. Peningkatan Sarana Prasarana Desa	Indeks Sosial Desa	79,43	79,43	100
		SPD.1.4. Peningkatan Aktivitas Ekonomi Desa	Indeks Ekonomi Desa	70,68	70,68	100
		SPD.1.3. Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah		42,00	42,00	100
		SPD.1.4. Nilai SAKIP		70,90	70,90	100
		SPD 1.5. Nilai IKM		96,02	96,02	100
Perhitungan Indikator Kinerja						

Dari hasil evaluasi kinerja 2025, tercapai sebagai berikut

No	Indikator kinerja program	Satuan	capaian 2024	Target	Target Review	Realisasi KinerjaTW III	% Capaian TW III	Status Capaian	Target Akhir RPJMD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
1	Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	%	8.33	4.03	19.89	18.52	93.11	Tercapai	4.25
2	Rasio penerima program usaha produktif laki- laki : perempuan	angka	73.33	50	50	66.15	132.30	Tercapai	50
3	Persentase rata-rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi	%	3.35	2.3	18.32	20.08	109.61	Tercapai	2.8
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1	Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	%	82.65	77.28	77.28	100.00	129.40	Tercapai	78.4
2	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100.00	100	100	100.00	100.00	Tercapai	100
3	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100.00	100	100	100.00	100.00	Tercapai	100

4	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100.00	100	100	100.00	100.00	Tercapai	100
5	Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100.00	100	100	100.00	100.00	Tercapai	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
1	Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	%	89.49	95.65	95.65	87.91	91.91	Tercapai	95.7
2	Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS	%	100.00	90	90	100.00	111.11	Tercapai	95
3	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS	%	90.00	80	80	87.50	109.38	Tercapai	85
4	Persentase KPM PKH graduasi	%	2.79	2.3	2.3	1.83	79.57	Tercapai	2.8
PROGRAM PENANGANAN BENCANA									

1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100.00	100	100	100.00	100.00	Tercapai	100
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									
1	Persentase kelengkapan makam pahlawan dalam kondisi baik	%	85.71	84	84	85.71	102.04	Tercapai	87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
PROGRAM PENATAAN DESA									
1	Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas desa	%	98.87	80	98.87	98.73	99.86	Tercapai	100
2	Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik	%	81.78	69	81.78	73.92	90.39	Tercapai	70
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA									
1	Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	%	85.71	85	85	100.00	117.65	Tercapai	90
2	Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang	%	100.00	23.97	23.97	100.00	417.19	Tercapai	24.91

	terbentuk								
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
1	Persentase desa berkinerja baik	%	100.00	75	75	100.00	133.33	Tercapai	80
2	Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	%	13.19	6.97	12.55	13.31	106.06	Tercapai	7
3	Persentase BUMDes berkembang dan maju	%	17.99	3	8.87	18.52	208.79	Tercapai	4.3
4	Persentase BUMDes berbadan hukum	%	34.39	48	48	66.14	137.79	Tercapai	70.27
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									
1	Persentase PKK aktif	%	100.00	100	100	100.00	100.00	Tercapai	100
2	Persentase Posyandu aktif	%	100.00	100	100	100.00	100.00	Tercapai	100
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	99.90	92	92	99.92	108.61	Tercapai	95
4	Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa		100.00	85	100	100.00	100.00	Tercapai	90

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator program RPJMD yang ditetapkan telah terealisasi pada tahun 2024 dan seluruhnya sudah mencapai kategori sangat tinggi. Hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah pengampu urusan dan seluruh pengampu kepentingan Crosscutting

Selain melihat capaian di atas, hasil kinerja Dinas Sosial PMD Wonosobo juga Nampak dari hasil capaian kinerja layanan yang ada di Dinas SosialPMD. Pada Tahun 2025, capaian kinerja layanan mendapatkan nilai 87,37 berada di zona hijau. Artinya menunjukkan bahwa Dinas Sosial PMD Wonosobo telah memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan public. Maka fokus utama dinas harus bergeser dari sekadar memenuhi standar minimal menjadi menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas layanan ke tahap yang lebih adaptif.

2.2 Analisis Capaian Kinerja dan Faktor Penentu

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pencapaian kinerja di tahun 2026 (proyeksi) dipengaruhi beberapa factor, struktur dan operasional yang menjadi tantangan organisasi berulang di Dinsos PMD:

1. Keterbatasan Infrastruktur Pelayanan Sosial: Meskipun jumlah penanganan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah meningkat, Dinsos PMD masih menghadapi kendala serius terkait sarana dan prasarana. Tidak adanya sarana prasarana tempat penampungan/shelter yang memadai (hanya dua kamar isolasi) sangat menghambat penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan permasalahan sosial yang kompleks yang membutuhkan penanganan tuntas (misalnya 70–80 rata-rata penerimaan layanan darurat per tahun).
2. Akuntabilitas dan Ketepatan Sasaran Data: Efektivitas program bantuan sosial (termasuk Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga) masih terhambat oleh ketidakakuratan data yang belum memadai (DTSEN). Meskipun ada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, penguatan basis data terpadu masih menjadi pekerjaan rumah untuk memastikan ketepatan sasaran.
3. Masalah SDM dan Kelembagaan Desa: Faktor penentu kemandirian desa, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, Karang Taruna, PKK), belum optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pembinaan, keterbatasan kapasitas kader, dan lemahnya regenerasi. Demikian pula, tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan rendahnya Pendapatan Asli Desa (PADes) masih menjadi tantangan dalam optimalisasi peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.
4. Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS): Walaupun ada upaya penjangkauan, tingginya angka ATS (total 5.938 anak terkonfirmasi tidak sekolah di tahun 2024, dengan jumlah tertinggi pada usia 16–18 Tahun) menunjukkan perlunya transformasi skala penuntasan anak tidak sekolah melalui integrasi dukungan sosial dan ekonomi keluarga.

2.3 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinsos PMD Tahun 2027

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2026 dan analisis kendala, berikut adalah permasalahan dan isu strategis utama yang harus diatasi melalui Renja Tahun 2027:

Permasalahan Pokok:

1. **Belum Optimalnya Cakupan Penanganan Pelayanan Kesejahteraan Sosial** Meskipun SPM terpenuhi, cakupan penanganan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (termasuk rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial yang adaptif) masih belum optimal. Hal ini diperparah oleh **jumlah Lanjut Usia Terlantar (2.027 jiwa) dan Penyandang Disabilitas Fisik (1.204 jiwa)** yang memerlukan perlindungan sosial memadai.
2. **Lemahnya Tata Kelola Data Terpadu dan Basis Data Kemiskinan** Ketidakakuratan data **penerima** bantuan dan perlindungan sosial masih menjadi penghambat utama ketepatan sasaran. Diperlukan **penguatan data DTSEN dan pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** secara berkelanjutan.
3. **Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Kelembagaan Ekonomi Desa** Isu strategis di bidang Pemberdayaan Desa adalah **Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa** dan pengelolaan BUMDes yang belum optimal, yang **berimplikasi** pada rendahnya partisipasi masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).
4. **Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)** ATS, terutama pada jenjang pendidikan menengah atas, masih menjadi tantangan serius yang memerlukan **integrasi dukungan sosial dan ekonomi keluarga** dan perluasan akses ke layanan pendidikan.

2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, masyarakat dapat mengusulkan melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Usulan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah. Dinas Sosial PMD sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat.

Pengajuan usulan untuk tahun 2027 akan mempertimbangkan hasil musrenbang tahun 2026

2.5 Inovasi Bidang urusan

Terkait dengan Inovasi, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo melaksanakan launching Aplikasi berbasis web berupa Aplikasi Primadona Desa. Primadona Desa dikembangkan sebagai solusi digital untuk mengatasi inefisiensi birokrasi manual dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer desa, sejalan dengan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Wonosobo. Pengembangan aplikasi Primadona desa dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan dan kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama terkait dengan alokasi dan pertanggungjawaban dana yang besar.

Tujuan utama dari pengembangan dan implementasi aplikasi Primadonadesa di Kabupaten Wonosobo, khususnya sebagai platform upload persyaratan dana transfer desa dan kewajiban desa, dapat

dikelompokkan menjadi tiga pilar utama: Efisiensi, Akuntabilitas, dan Kualitas Tata Kelola Desa.

2.6 Review dan Perbandingan Rancangan awal dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Penyajian perbandingan antara Rancangan Awal (Ranwal) Renja dan Rancangan Akhir (Rankhir) Renja bertujuan untuk menunjukkan proses akuntabilitas, transparansi, dan konsistensi perubahan program serta pagu anggaran akibat adanya masukan dari forum musyawarah dan hasil verifikasi tim perencanaan.

Beberapa catatan penting terkait perbedaan Rancangan Awal Renja dengan Rancangan Akhir Renja adalah sebagai berikut:

- a. Pada rancangan awal rencana kinerja anggaran tersedia sebesar Rp. 24.260.222.324 menjadi Rp. 19,133,110,465 pada rancangan akhir Renja 2027. Hal ini dikarenakan adanya refocusing kebijakan akibat dinamika internal daerah. Dalam upaya menyusun Kebijakan Efisiensi dan Penataan Ruang Fiskal Daerah. Hal ini mengacu pada surat edaran kepala daerah dan kebijakan penyesuaian pendapatan, APBD Kabupaten Wonosobo menuntut efisiensi belanja operasi non-prioritas untuk dialokasikan pada program berdampak langsung. Dalam upaya tersebut, DinsosPMD memangkas anggaran belanja rutin (rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas aparatur) untuk dialihkan sebagai anggaran dukungan intervensi prioritas bupati dan disesuaikan kembali berdasar kekuatan anggaran daerah.
- b. Di tengah tantangan kebijakan fiskal dan keterbatasan anggaran daerah, pemerintah tetap memfokuskan alokasi dana pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 serta program prioritas strategis kerja bupati untuk kesejahteraan masyarakat. Prioritas yang dimaksud adalah terkait dengan Pemenuhan Hak Dasar, yaitu menjamin alokasi minimal untuk

warga terlanjar dan rentan, Pemenuhan Hak Dasar yaitu menyelaraskan program kerja bupati yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Serta Efisiensi Belanja yaitu Menjaga rasio anggaran agar fokus pada output pelayanan publik.

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu Definitif)				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Perogram/ Kegiatan	Lokasi	Indukator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Selisih
1										
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				24,260,222,324	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			19,133,110,465	(5,127,111,859)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19,055,602,324	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14,103,790,945	(4,951,811,379)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				19,055,602,324	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			14,103,790,945	(4,951,811,379)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				9,714,396,324	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			9,688,054,115	(26,342,209)
			-	-	9,644,396,324			-	9,658,054,115	13,657,791
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Wonosobo			15,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan	Wonosobo		10,000,000	(5,000,000)

	Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	-				15,000,000	-			10,000,000	(5,000,000)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5,000,000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	-
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10,000,000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	(5,000,000)
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wonosobo			5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wonosobo		5,000,000	-
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	5,000,000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5,000,000	-

			kat Daerah					Daerah		
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wonosobo			10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wonosobo		5000000	(5,000,000)
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10,000,000	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5000000	(5,000,000)
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Wonosobo			4,260,222,324	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Wonosobo		4260222324	-
	-				4,260,222,324	-			4260222324	-
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4,260,222,324			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,260,222,324	-
1.06.01.2.02.00	Penyediaan Gaji dan	Wonosobo			4,260,222,3	Penyediaan Gaji dan	Wonosobo		4260222324	-

01	Tunjangan ASN				24	Tunjangan ASN				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	4,260,222,324	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	426022324	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wonosobo			232,050,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wonosobo		222050000	(10,000,000)
	-				232,050,000	-			222,050,000	(10,000,000)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	4,000,000			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4000000	-

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	7,000,000			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7000000	-
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	120,050,000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,050,000	-
			Jumlah Paket Barang Cetak	-	20,000,000			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggan	20,000,000	-

			an dan Pengg andaa n yang Disedi akan					daan yang Disediak an		
			Jumla h Paket Komp onen Instala si Listrik /Pener angan Bangu nan Kanto r yang Disedi akan	-	20,000,000			Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/ Peneran gan Banguna n Kantor yang Disediak an	20,000,000	-
			Jumla h Paket Peralat tan dan Perlen gkapa n Kanto r yang Disedi akan	-	46,000,000			Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an	46,000,000	-
			Jumla h Paket Perala	-	15,000,000			Jumlah Paket Peralata n	5,000,000	(10,000,000)

			tan Ruma h Tangg a yang Disedi akan					Rumah Tangga yang Disediak an		
1.06.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen InstalasiListri k/Penerangan Bangunan Kantor	Wonosobo			20,000,000	Penyediaan Komponen InstalasiListr ik/Penerang an Bangunan Kantor	Wonos obo		20,000,000	-
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor		Jumla h Paket Komp onen Instala si Listrik /Pener angan Bangu nan Kanto r yang Disedi akan	250 Paket	20,000,000	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/ Peneran gan Banguna n Kantor yang Disediak an	20,000,000	-
1.06.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wonosobo			46,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Wonos obo		46,000,000	-
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumla h Paket Perala tan	12 Paket	46,000,000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkap an Kantor		Jumlah Paket Peralata n dan Perleng k	46,000,000	-

			dan Perlen gkapa n Kanto r yang Disedi akan					apan Kantor yang Disediak an		
1.06.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wonosobo			15,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wonosobo		5,000,000	(10,000,000)
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumla h Paket Peralat an Ruma h Tangg a yang Disedi akan	12 Paket	15,000,000	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an	5000000	(10,000,000)
1.06.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Wonosobo			20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Wonosobo		20,000,000	-
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumla h Paket Barang Cetak an dan Pengg andaan yang Disedi akan	12 Paket	20,000,000	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediak an	20,000,000	-

1.06.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Wonosobo			4,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Wonos obo		4,000,000	-
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumla h Doku men Bahan Bacaa n dan Peratu ran Perun dang- Undan gan yang Disedi akan	12 Dokum en	4,000,000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- Undanga n yang Disediak an	4,000,000	-
1.06.01. 2.06.00 09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wonosobo			120,050,000	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wonos obo		120,050,00 0	-
	Terlaksanany a Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumla h Lapora n Penyel enggar aan Rapat Koordi nasi dan	120 Lapora n	120,050,000	Terlaksanan ya Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	120,050,00 0	-

			Konsu ltasi SKPD							
1.06.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Wonosobo			7,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	Wonos obo		7,000,000	-
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumla h Doku men Dukun gan Pelaks anaan Siste m Pemer intaha n Berbas is Elektr onik pada SKPD	0 Dokum en	7,000,000	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokume n Dukunga n Pelaksan aan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektron ik pada SKPD	7,000,000	-
1.06.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Wonosobo			4,100,000,0 00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Wonos obo		4,091,100,7 35	(8,899,265)
	-					-				(8,899,265)

					4,100,000,000				4,091,100,735	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	50,000,000			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44999735	(5,000,265)
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	-
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	4,000,000,000			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	400000000	-
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedi	-	50,000,000			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46101000	(3,899,000)

			akan							
1.06.01. 2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Wonosobo			50,000,000	Pengadaan Mebel	Wonosobo		44,999,735	(5,000,265)
	Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disedi akan	30 Unit	50,000,000	Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediak an	44999735	(5,000,265)
1.06.01. 2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosobo			50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosobo		46,101,000	(3,899,000)
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedi akan	5 Unit	50,000,000	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediak an	46,101,000	(3,899,000)
1.06.01. 2.07.00 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Wonosobo			-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Wonosobo		-	-
	Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disedi	1 Unit	-	Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediak an	0	-

			akan							
1.06.01. 2.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wonosobo			4,000,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wonosobo		4,000,000,000	-
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4,000,000,000	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,000,000,000	-
1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wonosobo			831,950,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wonosobo		829,507,056	(2,442,944)
	-				831,950,000	-			829,507,056	(2,442,944)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	37,500,000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,500,000	-

			r Daya Air dan Listrik yang Disedi akan					yang Disedi ak an		
			Jumla h Lapora n Penye diaan Jasa Pelaya nan Umum Kanto r yang Disedi akan	-	789,950,000			Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disedi ak an	787,507,05 6	(2,442,944)
			Jumla h Lapora n Penye diaan Jasa Surat Menyura t	-	4,500,000			Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat Menyura t	4,500,000	-
1.06.01. 2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wonosobo			4,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wonos obo		4,500,000	-
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumla h Lapora n Penye	12 Lapora n	4,500,000	Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat	4,500,000	-

			diaan Jasa Surat Menyu rat					Menyura t		
1.06.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wonosobo			37,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wonosobo		37500000	-
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumla h Lapora n Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik yang Disedi akan	12 Lapora n	37,500,000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an	37500000	-
1.06.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wonosobo			789,950,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wonosobo		787507056	(2,442,944)
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumla h Lapora n Penye diaan	12 Lapora n	789,950,000	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayana n Umum	787507056	(2,442,944)

			Jasa Pelayan an Umum Kanto r yang Disedi akan					Kantor yang Disediak an		
1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wonosobo			275,174,000	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Wonos obo		275,174,00 0	-
	-				275,174,000	-			275,174,00 0	-
			Jumla h Gedun g Kanto r dan Bangu nan Lainny a yang Dipeli hara/ Direha bilitas i	-	150,000,000			Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipeliha ra/Direh abilitasi	150,000,00 0	-

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizina nya	-	83,300,000			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizina nya	83,300,000	-
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	24,874,000			Jumlah Mebel yang Dipelihara	24,874,000	-
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	17,000,000			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17000000	-

1.06.01. 2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wonosobo			83,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wonos obo		83,300,000	-
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumla h Kenda raan Dinas Opera sional atau Lapan gan yang Dipeli hara dan dibaya rkan Pajak dan Perizi nanny a	15 Unit	83,300,000	Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipeliha ra dan dibayark an Pajak dan Perizina nnya	83,300,000	-
1.06.01. 2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Wonosobo			24,874,000	Pemeliharaa n Mebel	Wonos obo		24,874,000	-
	Terlaksananya Pemeliharaan		Jumla h Mebel	241 Unit	24,874,000	Terlaksanan ya Pemeliharaa		Jumlah Mebel yang	24,874,000	-

	Mebel		yang Dipeli hara			n Mebel		Dipeliha ra		
1.06.01. 2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosobo			17,000,000	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonos obo		17,000,000	-
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumla h Peralat an dan Mesin Lainnya yang Dipeli hara	21 Unit	17,000,000	Terlaksananya Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralata n dan Mesin Lainnya yang Dipeliha ra	17,000,000	-
1.06.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wonosobo			150,000,000	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wonos obo		150,000,00 0	-
	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumla h Gedung Kant or dan Bang unan Lainnya yang Dipeli hara/ Direha bilitas i	2 Unit	150,000,000	Terlaksananya Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipeliha ra/Direh abilitasi	150,000,00 0	-
1.06.02	PROGRAM					PROGRAM			165000000	(500,000,000)

	PEMBERDAYA AN SOSIAL				665,000,000	PEMBERDAY AAN SOSIAL				
			-	-	490,000,000			-	65000000	(425,000,000)
1.06.02. 2.01	Pemberdayaa n Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Wonosobo			300,000,000	Pemberdayaa n Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Wonos obo		100000000	(200,000,000)
	-				300,000,000	-			100000000	(200,000,000)
			Jumla h Kelu ar ga pada KAT yang Menda patka n Pembe rdayaa n Sosial yang terpad u dan berkel anjuta n Kewen angan Kabup aten/ Kota	-	250,000,000			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapa tkan Pemberd ayaan Sosial yang terpadu dan berkelan jutan Kewena ngan Kabupat en/Kota	50000000	(200,000,000)

			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50,000,000			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50000000	-
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Wonosobo			50,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Wonosobo		50000000	-
	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga	50,000,000	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	-

1.06.02. 2.01.00 04	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Wonosobo			250,000,000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Wonosobo		50,000,000	(200,000,000)
	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	250,000,000	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	(200,000,000)
1.06.02. 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo			365,000,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo		65,000,000	(300,000,000)

						Kota				
	-				365,000,000	-			65,000,000	(300,000,000)
			Jumlah aduan /keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	-	75,000,000			Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	50000000	(25,000,000)
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	100,000,000			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10000000	(90,000,000)

			Jumlah Penyulu uh Sosial, Penyulu uh Sosial Masya rakat, Pekerj a Sosial, Pekerj a Sosial Masya rakat dan/at au Tenag a Keseja hteraa n Sosial Kecam atan yang Menin gkat Kapasi tasnya	-	75,000,000			Jumlah Penyulu h Sosial, Penyulu h Sosial Masyara kat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyara kat dan/ata u Tenaga Kesejaht eraan Sosial Kecamat an yang Meningk at Kapasita snya	75000000	-
--	--	--	--	---	------------	--	--	--	----------	---

			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50,000,000			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	5000000	(45,000,000)
--	--	--	--	---	------------	--	--	--	---------	--------------

			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-	50,000,000			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	0	(50,000,000)
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda	-	15,000,000			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	0	(15,000,000)

			Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial					yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial		
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Wonosobo			100,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Wonosobo		10000000	(90,000,000)
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	10 Lembaga	100,000,000	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10000000	(90,000,000)

			Kabupaten/ Kota							
1.06.02. 2.03.00 10	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan , dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Wonosobo			15,000,000	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Wonosobo		0	(15,000,000)
	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan		Jumlah Warakawuri/ Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda	25 Orang	15,000,000	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda		Jumlah Warakawuri/ Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	0	(15,000,000)

			Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial			Perintis Kemerdekaan		yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial		
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Wonosobo			50,000,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Wonosobo		5000000	(45,000,000)
	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2 Orang	50,000,000	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningk	5000000	(45,000,000)

			yang menda patka n Pening katan Kapasi tas dan fasilit asi dalam penan ganan kasus Kewen angan Kabup aten/ Kota					atan Kapasita s dan fasilitasi dalam penanga nan kasus Kewena ngan Kabupat en/Kota		
1.06.02. 2.03.00 14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/K ota	Wonosobo			75,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Perseoranga n Kewenangan Kabupaten/ Kota	Wonos obo	0	0	(75,000,000)

	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	75,000,000	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	(75,000,000)
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Wonosobo			75,000,000	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Wonosobo		50000000	(25,000,000)

	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial		Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	50 Laporan	75,000,000	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial		Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	50000000	(25,000,000)
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo			50,000,000	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo		0	(50,000,000)
	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	50,000,000	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan	0	(50,000,000)

			Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis					Teknis		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,426,206,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			940000000	(486,206,000)
			-	-	1,051,206,000			-	830000000	(221,206,000)
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Wonosobo			1,231,206,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Wonosobo		835000000	(396,206,000)
	-				1,231,206,000	-			835000000	(396,206,000)
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan	-	65,000,000			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	65,000,000	-

			Rujuk an Kewen angan Kabup aten/ Kota					Kabupat en/Kota		
			Jumla h Orang yang Menda patka n Akses ke Layan an Pendid ikan dan Keseh atan Dasar Kewen angan Kabup aten/ Kota	-	50,000,000			Jumlah Orang yang Mendapa tkan Akses ke Layanan Pendidik an dan Kesehat an Dasar Kewena ngan Kabupat en/Kota	20,000,000	(30,000,000)
			Jumla h Orang yang Menda patka n Alat Bantu dan Alat	-	156,000,000			Jumlah Orang yang Mendapa tkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	130,000,000	(26,000,000)

			Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100,000,000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000	(70,000,000)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	-	70,000,000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	30000000	(40,000,000)

			Kewenangan Kabupaten/ Kota					Kabupaten/ Kota		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	45,000,000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10000000	(35,000,000)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	-	50,000,000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	30000000	(20,000,000)

			Kabupaten/ Kota							
			Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemen uhan Kebut uhan Perbek alan Keseh atan di Luar Panti Kewen angan Kabup aten/ Kota	-	10,000,000			Jumlah Orang yang Mendapa tkan Pemenu han Kebutuh an Perbekal an Kesehat an di Luar Panti Kewena ngan Kabupat en/Kota	5000000	(5,000,000)
			Jumlah Orang yang Mendapa tkan Pemenu han Kebutuh an	-	160,206,000			Jumlah Orang yang Mendapa tkan Pemenu han Kebutuh an	100000000	(60,206,000)

			Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	75,000,000			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20000000	(55,000,000)

			Jumlah Orang yang Terpe nuhi Kebut uhan Pembu atan Doku men Kepen duduk an bagi Penya ndang Disabil itas Terlan tar, Anak Terlan tar, Lanjut Usia Terlan tar, Gelan danga n dan Penge mis Kewen angan Kabup aten/ Kota	-	50,000,000			Jumlah Orang yang Terpenu hi Kebutuh an Pembuat an Dokume n Kependu dikan bagi Penyand ang Disabilit as Terlanta r, Anak Terlanta r, Lanjut Usia Terlanta r, Gelanda ngan dan Pengemi s Kewena ngan Kabupat en/Kota	25000000	(25,000,000)
--	--	--	---	---	------------	--	--	--	----------	--------------

			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	200,000,000			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200000000	-
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	-	200,000,000			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemi	170000000	(30,000,000)

			Usia Terlan tar, serta Gelan dangan Penge mis dan Masya rakat Kewen angan Kabup aten/ Kota					s dan Masyara kat Kewena ngan Kabupat en/Kota		
1.06.04. 2.01.00 01	Penyediaan Permakanan	Wonosobo			160,206,000	Penyediaan Permakanan	Wonos obo		100000000	(60,206,000)
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/K ota		Jumla h Orang yang Menda patka n Pemen uhan Kebut uhan Perma kanan Sesuai denga n Stand ar Gizi Minim	200 Orang	160,206,000	Terpenuhiny a Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Orang yang Mendapa tkan Pemu nu han Kebutuh an Perma ka nan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewena ngan Kabupat	100000000	(60,206,000)

			al Kewen angan Kabup aten/ Kota					en/Kota		
1.06.04. 2.01.00 02	Penyediaan Sandang	Wonosobo			75,000,000	Penyediaan Sandang	Wonos obo		20000000	(55,000,000)
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/K ota		Jumla h Orang yang Mener ima Pakaia n dan Keleng kapan Lainny a yang Tersed ia dalam 1 Tahun Kewen angan Kabup aten/ Kota	30 Orang	75,000,000	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Orang yang Menerim a Pakaian dan Kelengk apan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewena ngan Kabupat en/Kota	20000000	(55,000,000)
1.06.04. 2.01.00 03	Penyediaan Alat Bantu	Wonosobo			156,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Wonos obo		130000000	(26,000,000)

	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	156,000,000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	130000000	(26,000,000)
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Wonosobo			50,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Wonosobo		300000000	(20,000,000)
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	50 Orang	50,000,000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300000000	(20,000,000)

			Kabupaten/ Kota							
1.06.04. 2.01.00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Wonosobo			200,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Wonosobo		200000000	-
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	200,000,000	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200000000	-
1.06.04. 2.01.00 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Wonosobo			200,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,	Wonosobo		170000000	(30,000,000)

	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	350 Orang	200,000,000	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	170000000	(30,000,000)

			dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Wonosobo			50,000,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Wonosobo		20000000	(30,000,000)
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	30 Orang	50,000,000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20000000	(30,000,000)

			Kabupaten/ Kota							
1.06.04. 2.01.00 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Wonosobo			100,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Wonosobo		30000000	(70,000,000)
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100,000,000	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30000000	(70,000,000)
1.06.04. 2.01.00 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Wonosobo			70,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Wonosobo		30000000	(40,000,000)
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan	20 Orang	70,000,000	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	30000000	(40,000,000)

			Pelayan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota			Kota		Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
1.06.04. 2.01.00 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Wonosobo			45,000,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Wonosobo		10000000	(35,000,000)
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	45,000,000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10000000	(35,000,000)
1.06.04. 2.01.00 12	Pemberian Layanan Rujukan	Wonosobo			65,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	Wonosobo		65000000	-
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan		Jumlah Orang Mendapatkan	30 Orang	65,000,000	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan	65000000	-

	Kabupaten/Kota		n Layan an Rujuk an Kewen angan Kabup aten/ Kota			Kewenangan Kabupaten/ Kota		Rujukan Kewena ngan Kabupat en/Kota		
1.06.04. 2.01.00 14	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependuduka n bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Wonosobo			50,000,000	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependuduk an bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Wonosobo		25000000	(25,000,000)

	<p>Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>75 Orang</p>	<p>50,000,000</p>	<p>Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>25000000</p>	<p>(25,000,000)</p>
--	---	--	---	------------------------	--------------------------	---	--	---	------------------------	----------------------------

1.06.04. 2.01.00 17	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Wonosobo			10,000,000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Wonosobo		5000000	(5,000,000)
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	10,000,000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	5000000	(5,000,000)
1.06.04. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Wonosobo			195,000,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Wonosobo		105000000	(90,000,000)

						Sosial				
	-				195,000,000	-			105000000	(90,000,000)
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyang Masala	-	-			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyang Masalah Lainnya di Luar	0	-

			h Keseja hteraa n Sosial (PMKS) Lainny a di Luar HIV/A IDS Kewen angan Kabup aten/ Kota					HIV/AID S Kewena ngan Kabupat en/Kota		
			Jumla h Orang yang Menda patka n Pemen uhan Kebut uhan Perma kanan Sesuai denga n Stand ar Gizi Minim al Kewen	-	75,000,000			Jumlah Orang yang Mendapa tkan Pemenu han Kebutuh an Permaka nan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewena ngan Kabupat en/Kota	30000000	(45,000,000)

			angan Kabup aten/ Kota							
			Jumla h orang yang Mener ima pakaia n dan keleng kapan lainny a yang Tersed ia dalam 1 tahun Kewen angan Kabup aten/ Kota	-	0,00			Jumlah orang yang Menerim a pakaian dan kelengk apan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewena ngan Kabupat en/Kota	0	#VALUE!
			Jumla h Pesert a Bimbi ngan Fisik, Menta	-	120,000,000			Jumlah Peserta Bimbing an Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	75000000	(45,000,000)

			l, Spirit ual dan Sosial Kewen angan Kabup aten/ Kota					Kewena ngan Kabupat en/Kota		
			Jumla h Pesert a dalam Pembe rian Bimbi ngan Sosial kepad a Keluar ga Penya ndang Masala h Keseja hteraa n Sosial (PMKS) Lainny a Bukan Korba n	-	-			Jumlah Peserta dalam Pemberi an Bimbing an Sosial kepada Keluarga Penyand ang Masalah Kesejaht eraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AID S dan NAPZA Kewena ngan Kabupat en/Kota	0	-

			HIV/A IDS dan NAPZA Kewen angan Kabup aten/ Kota							
1.06.04. 2.02.00 03	Penyediaan Permakanan	Wonosobo			75,000,000	Penyediaan Permakanan	Wonos obo		30000000	(45,000,000)
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/K ota		Jumla h Orang yang Menda patka n Pemen uhan Kebut uhan Perma kanan Sesuai denga n Stand ar Gizi Minim al Kewen angan Kabup	50 Orang	75,000,000	Terpenuhiny a Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Orang yang Mendapa tkan Pemenu han Kebutuh an Permaka nan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewena ngan Kabupat en/Kota	30000000	(45,000,000)

			aten/ Kota							
1.06.04. 2.02.00 04	Penyediaan Sandang	Wonosobo			-	Penyediaan Sandang	Wonosobo		0	-
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	-	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-
1.06.04. 2.02.00 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Wonosobo			120,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,	Wonosobo		75000000	(45,000,000)

						dan Sosial				
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	120,000,000	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75000000	(45,000,000)
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Wonosobo			-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Wonosobo		0	-

	<p>Terlaksanan ya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/K ota</p>		<p>Jumla h Pesert a dalam Pembe rian Bimbi ngan Sosial kepad a Kelu ar ga Penya ndang Masala h Keseja hteraa n Sosial (PMKS) Lainny a Bukan Korba n HIV/A IDS dan NAPZA Kewen angan Kabup aten/ Kota</p>	<p>25 Orang</p>	-	<p>Terlaksanan ya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>		<p>Jumlah Peserta dalam Pemberi an Bimbing an Sosial kepada Keluarga Penyand ang Masalah Kesejaht eraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AID S dan NAPZA Kewena ngan Kabupat en/Kota</p>	<p>0</p>	-
--	---	--	--	----------------------------	---	--	--	---	-----------------	---

1.06.04. 2.02.00 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependuduka n, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Wonosobo			-	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Wonos obo		0	-
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhka n Pembuatan Nomor Induk Kependuduka n, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/K ota		Jumla h Orang yang Memb utuhk an Pembu atan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahi ran, Surat Nikah, dan/at au Identi tas Anak bagi	15 Orang	-	Terpenuhiny a Orang yang Membutuhka n Pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Orang yang Membut uhkan Pembuat an Nomor Induk Kependu dikan, Kartu Tanda Pendudu k, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Identita s Anak bagi Penyand ang Masalah Kesejaht eraan Sosial	0	-

			Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota					(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				7,000,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			2952736830	(4,047,263,170)
			-	-	6,850,000,000			-	2877736830	(3,972,263,170)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo			7,000,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Wonosobo		2952736830	(4,047,263,170)
	-				7,000,000,000	-			2952736830	(4,047,263,170)

			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	-	200,000,000			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	75000000	(125,000,000)
			Jumlah Orang Mendapatka n Bantuan Pengem bang an Ekonomi Masya rakat Kewen angan Kabup aten/ Kota	-	150,000,000			Jumlah Orang Mendapa tkan Bantuan Pengem bangan Ekonomi Masyara kat Kewena ngan Kabupat en/Kota	50000000	(100,000,000)

			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	6,500,000,000			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2752736830	(3,747,263,170)
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan	-	150,000,000			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksan	75000000	(75,000,000)

			Perbaikan yang dilaksanakan					akan		
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			75000000	(125,000,000)
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	479809 Orang	200,000,000	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	75000000	(125,000,000)
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				150,000,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			50000000	(100,000,000)
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan	30 Orang	150,000,000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonom	50000000	(100,000,000)

	Kabupaten/Kota		Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		i Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				6,500,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			2752736830	(3,747,263,170)
	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang	6,500,000,000	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2752736830	(3,747,263,170)

			aten/ Kota							
1.06.05. 2.02.00 08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota				150,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			75000000	(75,000,000)
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota		Jumlah Usulan Penindaklay akan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	66071 Usulan	150,000,000	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	75000000	(75,000,000)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				175,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			130000000	(45,000,000)

			-	-	125,000,000			-	110000000	(15,000,000)
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				135,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			110000000	(25,000,000)
	-				135,000,000	-			110000000	(25,000,000)
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25,000,000			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20000000	(5,000,000)

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30,000,000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000	-
			Jumlah Orang yang Mendapatkan	-	30,000,000			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan	10000000	(20,000,000)

			Penan ganan Khusu s bagi Kelom pok Rentan Kewen angan Kabup aten/ Kota					Khusus bagi Kelompo k Rentan Kewena ngan Kabupat en/Kota		
			Jumla h Orang yang Menda patka n Perma kanan 3x1 Hari dalam Masa Tangg ap Darura t (Pengu ngsian) Kewen angan Kabup aten/ Kota	-	50,000,000			Jumlah Orang yang Mendapa tkan Permaka nan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengu ngsian) Kewena ngan Kabupat en/Kota	50000000	-
1.06.06.	Penyediaan	Wonosobo			50,000,000	Penyediaan			50000000	-

2.01.00 01	Makanan					Makanan				
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50,000,000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50000000	-
1.06.06. 2.01.00 02	Penyediaan Sandang	Wonosobo			30,000,000	Penyediaan Sandang			30000000	-

	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	30,000,000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30000000	-
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Wonosobo			30,000,000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			10000000	(20,000,000)

	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	30,000,000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10000000	(20,000,000)
1.06.06.2.01.00.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Wonosobo			25,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial			20000000	(5,000,000)
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	20 Orang	25,000,000	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20000000	(5,000,000)

			Kewenangan Kabupaten/Kota							
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Wonosobo			40,000,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			20000000	(20,000,000)
	-				40,000,000	-			20000000	(20,000,000)
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan	-	20,000,000			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	(20,000,000)

			angan Kabup aten/ Kota							
			Jumla h Orang yang Melak sanak an Koordi nasi, Sosiali sasi dan Pelaks anaan Tarun a Siaga Benca na Kewen angan Kabup aten/ Kota	-	20,000,000			Jumlah Orang yang Melaksa nakan Koordin asi, Sosialisa si dan Pelaksan aan Taruna Siaga Bencana Kewena ngan Kabupat en/Kota	20000000	-
1.06.06. 2.02.00 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung	Wonosobo			20,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung			-	(20,000,000)

	Siaga Bencana					Siaga Bencana				
	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	20,000,000	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	(20,000,000)
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Wonosobo			20,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			20,000,000	-

	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	20,000,000	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000	-
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				75,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			228,000,000	153,000,000
			-	-	75,000,000			-	228,000,000	153,000,000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Wonosobo			75,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			228,000,000	153,000,000

						Kota				
	-				75,000,000	-			228,000,000	153000000
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	30,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	198,000,000	168000000
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan	-	45,000,000			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman	30,000,000	-15000000

			nya pada Taman Maka m Pahla wan Kabup aten/ Kota					Makam Pahlawa n Kabupat en/Kota		
1.06.07. 2.01.00 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	Wonosobo			30,000,000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota			198,000,00 0	168000000
	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota		Jumla h Doku men Hasil Rehab ilitasi serta Pemeli haraan Sarana dan Prasar ana Taman Maka m Pahla wan Nasion	1 Dokum en	30,000,000	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokume n Hasil Rehabili tasi serta Pemelih araan Sarana dan Prasaran a Taman Makam Pahlawa n Nasional Kabupat en/Kota	198,000,00 0	168000000

			al Kabup aten/ Kota							
1.06.07. 2.01.00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	Wonosobo			45,000,000	Pemeliharaa n Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota			30000000	-15000000
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota		Jumla h Maka m yang Terpe nuhi Pemeli haran nya pada Taman Maka m Pahla wan Kabup aten/ Kota	125 Maka m	45,000,000	Terlaksanan ya Pemeliharaa n Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		Jumlah Makam yang Terpenu hi Pemelih arannya pada Taman Makam Pahlawa n Kabupat en/Kota	30000000	-15000000
2	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN				5,204,620,0 00	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN			502931952 0	-175300480

	DENGAN PELAYANAN DASAR					DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,204,620,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5029319520	-175300480
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				175,000,000	PROGRAM PENATAAN DESA			50000000	-125000000
			-	-	175,000,000			-	50000000	-125000000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Wonosobo			175,000,000	Penyelenggaraan Penataan Desa			50000000	-125000000
	-				175,000,000	-			50000000	-125000000
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	-	175,000,000			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	50000000	-125000000
2.13.02.2.01.006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Wonosobo			175,000,000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			50000000	-125000000
	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan	4 Unit	175,000,000	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana	50000000	-125000000

			Prasar ana Desa yang terfasi litasi			Desa		a Desa yang terfasilitasi		
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				160,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			105000000	-55000000
			-	-	110,000,000			-	105000000	-5000000
2.13.03. 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Wonosobo			160,000,000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			105000000	-55000000
	-				160,000,000	-			105000000	-55000000
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	50,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	55000000	5000000
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa	-	50,000,000			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupat	50000000	0

			dalam Kabup aten/ Kota					en/Kota		
			Jumla h Doku men Kerja Sama Antar Desa denga n Pihak Ketiga dalam Kabup aten/ Kota	-	60,000,000			Jumlah Dokume n Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupat en/Kota	0	-60000000
2.13.03. 2.01.00 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota	Wonosobo			50,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota			50,000,000	-
	Terlaksanany a Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota		Jumla h Doku men Kerja Sama Antar Desa dalam Kabup aten/ Kota	1 Dokum en	50,000,000	Terlaksanan ya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokume n Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupat en/Kota	50,000,000	-

2.13.03. 2.01.00 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/K ota	Wonosobo			60,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota			-	(60,000,000)
	Terfasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/K ota		Jumla h Doku men Kerja Sama Antar Desa denga n Pihak Ketiga dalam Kabup aten/ Kota	1 Dokum en	60,000,000	Terfasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokume n Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupat en/Kota	-	(60,000,000)
2.13.03. 2.01.00 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Wonosobo			50,000,000	Fasilitasi Pembanguna n Kawasan Perdesaan			55,000,000	5,000,000
	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumla h Doku men Hasil Fasilit asi Pemb angunan Kawas	1 Dokum en	50,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Pembanguna n Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokume n Hasil Fasilitas i Pemban gunan Kawasan Perdesaa n	55,000,000	5,000,000

			an Perdes aan							
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRA SI PEMERINTAH AN DESA				4,119,620,0 00	PROGRAM ADMINISTRA SI PEMERINTA HAN DESA			4,262,000,0 00	142,380,000
			-	-	4,039,620,0 00			-	423700000 0	197380000
2.13.04. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa	Wonosobo			4,119,620,0 00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintaha n Desa			426200000 0	142380000
	-				4,119,620,0 00	-			426200000 0	142380000
			Jumla h Anggo ta BPD yang Mengi kuti Pemb inaan Pening katan Kapasita s	-	30,000,000			Jumlah Anggota BPD yang Mengiku ti Pembina an Peningk atan Kapasita s	150000000	120000000

			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	49,620,000			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	49620000	0
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-	10,000,000			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	0	-10000000
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan	-	30,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa	25000000	-5000000

			Desa serta Lomba Desa dan Kelura han					dan Kelurah an		
			Jumla h Doku men Hasil Fasilit asi Manaj emen Pemer intaha n Desa	-	20,000,000			Jumlah Dokume n Hasil Fasilitas i Manaje men Pemerin tahan Desa	10000000	-10000000
			Jumla h Doku men Hasil Fasilit asi Pengel olaan Aset Desa	-	20,000,000			Jumlah Dokume n Hasil Fasilitas i Pengelol aan Aset Desa	25000000	5000000
			Jumla h Doku men Hasil Fasilit asi Pengel olaan	-	2,800,000,0 00			Jumlah Dokume n Hasil Fasilitas i Pengelol aan Keuanga n Desa	302500000 0	225000000

			Keuangan Desa							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	15,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas i Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15000000	0
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	30,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas i Penyusunan Produk Hukum Desa	70000000	40000000
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	-	75,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan	42000000	-33000000

			dan Pembe rdayaa n BUM Desa dan Lemba ga Kerja Sama antar Desa					BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
			Jumla h Lapora n Fasilit asi Penga ngkata n dan Pembe rhenti an Perang kat Desa	-	40,000,000			Jumlah Laporan Fasilitas i Pengang katan dan Pemberh entian Perangk at Desa	20000000	-20000000
			Jumla h Lapora n Hasil Penyel enggar aan Pemili han, Penga ngkata	-	1,000,000,0 00			Jumlah Laporan Hasil Penyele nggaraa n Pemiliha n, Pengang katan dan Pemberh	830380000	-169620000

			n dan Pembe rhenti an Kepala Desa					entian Kepala Desa		
2.13.04. 2.01.00 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Wonosobo			30,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			70000000	40000000
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	30,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	70000000,0 0	#VALUE!
2.13.04. 2.01.00 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Wonosobo			15,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			15000000	0
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan	236 Dokumen	15,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	15000000	0

			Perencanaan Pembangunan Desa					Pembangunan Desa		
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Wonosobo			2,800,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			3025000000	225000000
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15 Dokumen	2,800,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	3025000000	225000000
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Wonosobo			49,620,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			49620000	0
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	250 Orang	49,620,000	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	49620000	0

			naan Pening katan Kapasi tas					Kapasita s		
2.13.04. 2.01.00 08	Pembinaan dan Pemberdayaa n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Wonosobo			75,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaa n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			42000000	-33000000
	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaa n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Jumla h Doku men Hasil Pembina an dan Pembe rdayaa n BUM Desa dan Lemba ga Kerja Sama antar Desa	15 Dokum en	75,000,000	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaa n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Jumlah Dokume n Hasil Pembina an dan Pemberd ayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	42000000	-33000000
2.13.04. 2.01.00 09	Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa	Wonosobo			1,000,000,0 00	Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkata n dan Pemberhenti an Kepala			830380000	-169620000

						Desa				
	Terselenggara kannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	166 Laporan	1,000,000,000	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	830380000	-169620000
2.13.04. 2.01.00 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Wonosobo			40,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			20000000	-20000000
	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian	15 Laporan	40,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20000000	-20000000

			Perang kat Desa							
2.13.04. 2.01.00 12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Wonosobo			2,000,000	Fasilitasi Manajemen Pemerintah an Desa			10000000	8,000,000
	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintah an Desa	15 Dokumen	20,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintah an Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas i Manajemen Pemerintahan Desa	10000000	(10,000,000)
2.13.04. 2.01.00 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Wonosobo			20,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			25000000	5,000,000
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15 Dokumen	20,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas i Pengelolaan Aset Desa	25000000	5,000,000
2.13.04. 2.01.00 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Wonosobo			30,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			150000000	120,000,000

	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	236 Orang	30,000,000	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150,000,000	120,000,000
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Wonosobo			10,000,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			-	(10,000,000)
	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	3 Desa	10,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-	(10,000,000)
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Wonosobo			30,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			25,000,000	(5,000,000)

	Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	236 Dokumen	30,000,000	Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25,000,000	(5,000,000)
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				750,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			612,319,520	(137,680,480)
			-	-	675,000,000			-	612,319,520	(62,680,480)

2.13.05. 2.01	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/K ota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/K ota	Wonosobo			750,000,000	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota			612,319,520	(137,680,480)
	-				750,000,000	-			612,319,520	(137,680,480)

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	500,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500,000,000	-
--	--	--	---	---	-------------	--	--	--	-------------	---

			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/	-	100,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	62,319,520	(37,680,480)
--	--	--	--	---	-------------	--	--	---	------------	--------------

			Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	75,000,000			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50,000,000	(25,000,000)

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	75,000,000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	(75,000,000)
--	--	--	---	---	-------------------	--	--	---	---	---------------------

2.13.05. 2.01.00 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaa n dan Pendayagunaa n Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat				100,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaa n dan Pendayaguna an Kelembagaan Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat			62,319,520	(37,680,480)
	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	3 Dokumen	100,000,000	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Ke	62,319,520	(37,680,480)

	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat		Lemba ga Kemas yarka tan Desa/ Kelura han (RT, RW, PKK, Posya ndu, LPM, dan Karan g Tarun a), Lemba ga Adat Desa/ Kelura han dan Masya rakat Huku m Adat			Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat		lurahan (RT, RW, PKK, Posyand u, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Ke lurahan dan Masyara kat Hukum Adat		
2.13.05. 2.01.00 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurah an (RT, RW,	Wonosobo			75,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelura han (RT, RW,			-	(75,000,000)

	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat					PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat				
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat		Jumla h Lemba ga Kemas yarakat an Desa/ Kelura han (RT, RW, PKK, Posya ndu, LPM, dan Karan g Tarun a), Lemba ga Adat Desa/ Kelura han dan	5 Lemba ga	75,000,000	Meningkatny a Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasy arakatan Desa/Ke lurahan (RT, RW, PKK, Posyand u, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Ke lurahan dan Masyara kat Hukum Adat yang Ditingka tkan Kapasita snya	-	(75,000,000)

			Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
2.13.05.2.01.00.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Wonosobo			75,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			50,000,000	(25,000,000)
	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	75,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50,000,000	(25,000,000)
2.13.05.2.01.00.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar	Wonosobo			500,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam			500,000,000	-

	aan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	500,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500,000,000	-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo yang merupakan penjabaran operasional dari Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta konsisten dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinsos PMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Dinsos PMD adalah penjabaran dari Misi Kepala Daerah dan menjadi arah strategis kinerja Dinsos PMD selama lima tahun, yang diimplementasikan melalui rencana kerja tahunan. Dinsos PMD memfokuskan dukungan pada Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati, yaitu **Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Produktif, Berkualitas Dan Berkepribadian Dengan Tersedianya Akses Pendidikan Dan Kesehatan.**

Berdasarkan Renstra, Tujuan Dinsos PMD Wonosobo Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Kelompok Rentan dengan Sasaran 1 Peningkatan kesejahteraan sosial, dan sasaran 2 Peningkatan Kemandirian Kelompok Rentan. Tujuan kedua adalah meningkatnya kemandirian dan kemajuan desa , dengan sasaran Peningkatan tata Kelola desa, peningkatan aksesibilitas desa, peningkatan sarpras desa dan peningkatan aktivitas ekoomi dsa

Sasaran tambahan lainnya adalah nilai kematangan Organisasi Peragkat daerah, nilai SAKIP dan Nilai IKM

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode Renja 2027 dan diukur dengan indikator kinerja.

Sasaran Dinsos PMD Tahun 2027 yang selaras dengan Tujuan Daerah:

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Utama	Target Tahun 2027
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Kelompok Rentan			57,75
	SPD.1.1.3.1.1. —Peningkatan kesejahteraan sosial (DO jumlah layanan kesejahteraan dan bantuan sosial yang diberikan dibagi jumlah DTSEN)	Cakupan Perlindungan dan Penerima Atensi Sosial	23,64
	SPD.1.1.3.1.2. Peningkatan Kemandirian Kelompok Rentan	Persentase Peningkatan Keluarga Miskin dan Rentan yang Tergraduasi	2,80
Meningkatnya Kemandirian dan Kemajuan Desa		Indeks Desa	77,92
	SPD.1.1. Peningkatan Tata Kelola Desa	Indeks kinerja pemerintahan desa (di indeks desa)	81,92
	SPD.1.2. Peningkatan Aksesibilitas Desa	Indeks Aksesibilitas Desa (di Indeks Desa)	88,81
	SPD.1.3. Peningkatan Sarana Prasarana Desa	Indeks Sosial Desa	79,43
	SPD.1.4. Peningkatan Aktivitas Ekonomi Desa	Indeks Ekonomi Desa	70,68
	SPD.1.3. Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah		42,00

	SPD.1.4. Nilai SAKIP		70,90
	SPD 1.5. Nilai IKM		96,02

Catatan: Target-target tersebut dirumuskan dalam kerangka waktu Renstra Dinsos PMD (2025-2029) dan konsisten dengan Tujuan Sasaran RPJMD/RKPD.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2027

Penyusunan Renja 2027 harus berpedoman pada Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra PD.

A. Strategi Jangka Menengah (2025–2029)

Strategi Dinsos PMD secara umum diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian desa. Strategi ini meliputi:

1. Meningkatkan Pendapatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
2. Mengurangi Beban Pengeluaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
3. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Meningkatkan pengelolaan risiko.
5. **Meningkatkan tata kelola kelembagaan kemasyarakatan desa.**
6. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.**
7. Mefasilitasi Kerjasama desa.

B. Arah Kebijakan Tahunan Tahun 2027

Tahun 2027 berada pada Tahapan Pembangunan **Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata** dengan tema **Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan.**

Arah Kebijakan Dinsos PMD Wonosobo Tahun 2027 difokuskan pada **Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan desa/kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan akselerasi layanan.**

Akselerasi layanan ini dijabarkan melalui langkah-langkah transformatif:

1. **Transformasi Skala Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS)** melalui integrasi dukungan sosial dan ekonomi keluarga.
 - Kegiatan mencakup penjangkauan anak terlantar dan fasilitasi anak kembali sekolah bagi keluarga prasejahtera desil 1 dan 2.
 - Perluasan **Peningkatan layanan rehabilitasi sosial dasar** untuk anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
2. **Transformasi Tata Kelola Data Terpadu** untuk ketepatan sasaran.
 - Penguatan data DTSEN.
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
3. **Penguatan Sinergi dalam Penanganan Bencana**
 - Dilakukan melalui **pendampingan dan pemberian layanan psikososial bagi korban bencana.**
4. **Optimalisasi Tata Kelola Desa yang Inklusif dan Akuntabel**
 - Evaluasi tata kelola pendapatan dan manajemen Barang Milik Daerah (BMD).
 - Fasilitasi dan evaluasi penerapan sistem absensi bagi kepala desa dan aparatur desa.
 - Fasilitasi kerja sama antar desa dalam pengembangan produk unggulan untuk perluasan pasar.

Pencapaian sasaran Dinsos PMD di tahun 2027 ini diharapkan mampu mengatasi isu strategis terkait **belum optimalnya cakupan penanganan kesejahteraan sosial dan rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan ekonomi desa**

Tabel Dukungan dan Sikronisasi Perencanaan Daerah Kabupaten Wonosobo

Nama Dinas Sosial
Perangkat PMD Wonosobo
Daerah :

[illegible]

[illegible]

	<p>PROGRAM PEMBER DAYAAN SOSIAL</p>		<p>Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri Rasio penerima program usaha produktif laki- laki : perempuan Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi</p>				<p>pertumbuhan ekonomi</p>	<p>penanggungan kemiskinan</p>	<p>Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan</p>	<p>Sobo Sehat Bergas, Cerdas , Mentas</p>	<p>peningkatan SDM yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan</p>		
--	---	--	---	--	--	--	----------------------------	--------------------------------	---	---	---	--	--

	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Cakupan pemberdayaan sosial KAT yang terfasilitasi kegiatan (pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas)		Wono	12 PAS	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)						
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan		Wono	12 PAS	ya	ya	ya	ya	ya		

[illegible]

[illegible]

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Wonosobo	LKS							
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenang		Wonosobo	LK3							

[illegible]

	PROGRA M REHABIL ITASI SOSIAL		Persentase warga negara penyanda ng disabilitas yang memperole h rehabilitas i sosial diluar panti Persentase PPKS yang memperole h layanan kesejahter aan sosial				Indeks demokr asi indonesi a	penang gulanga n kemiski nan	Pening katan pemba nguna n sumbe r daya manus ia yang produk tif, berkua litas dan berkep ribadia n dengan tersedi anya akses pendidi kan dan keseha tan	Sobo Sehat Bergas, Cerdas , Mentas	peningk atan SDM yang produkt if, berkuali tas dan berkepr ibadian denng an tersedia nya aksespe ndidika n dan kesehat an		
							Indeks modal manusi a						
							Angka kemiski nan						

	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>		<i>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/ pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti</i>				Mendorong Pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan			Sekolah Rayat untuk usia sekolah dari keluarga miskin			
							Peningkatan Kualitas Hidup Lansia						

	Penyedia an Permaka nan		Jumlah Orang yang Mendapat kan Pemenuha n Kebutuha n Permakan an Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenang an Kabupaten /Kota		Won osob o	Penyan dang Disabil itas Terlant ar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlant ar, serta Geland angan Penge mis	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
	Penyedia an Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkap an Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenang an		Won osob o	Penyan dang Disabil itas Terlant ar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlant ar, serta Geland	ya	ya	ya	ya	ya	ya	

[illegible]

	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota		Wonosobo	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge mis	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota		Wonosobo	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	ya	ya	ya	ya	ya	ya	

						Penge mis							
	Pemberia n Bimbinga n Sosial kepada Keluarga Penyand ang Disabilita s Terlantar , Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar , serta Gelandan gan Pengemis dan Masyara kat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanda ng Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis dan Masyaraka t Kewenang an Kabupaten		Won osob o	Penyan dang Disabil itas Terlant ar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlant ar, serta Geland angan Penge mis	ya	ya	ya	ya	ya	ya	

[illegible]

[illegible]

	Pemberia n Akses ke Layanan Pendidik an dan Kesehata n Dasar		Jumlah Orang yang Mendapat kan Akses ke Layanan Pendidika n dan Kesehatan Dasar Kewenang an Kabupaten /Kota		Won osob o	Penyan dang Disabil itas Terlant ar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlant ar, serta Geland angan Penge mis	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
	Pemberia n Layanan Data dan Pengadu an		Jumlah Orang yang Mendapat kan Layanan Data dan Pengadua n Kewenang an Kabupaten /Kota		Won osob o	Penyan dang Disabil itas Terlant ar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlant ar, serta Geland angan	ya	ya	ya	ya	ya	ya	

[illegible]

	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota		Wonosobo	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengegris	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota		Wonosobo	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	ya	ya	ya	ya	ya	ya	

[illegible]

	Pemberia n Bimbinga n Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenang an Kabupaten /Kota		Won osob o	12 PAS							
	Pemberia n Bimbinga n Sosial kepada Keluarga Penyand ang Masalah Kesejahte raan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AID S dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanda ng Masalah Kesejahter aan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenang an Kabupaten			12 PAS							

[illegible]

[illegible]

	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		Wonosobo	kelompok fakir miskin							
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Wonosobo	kelompok fakir miskin							
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenang		Wonosobo	12 PAS							

			an Kabupaten /Kota										
	Fasilitasi Bantuan Pengemb angan Ekonomi Masyara kat		Jumlah Orang Mendapat kan Bantuan Pengemba ngan Ekonomi Masyaraka t Kewenang an Kabupaten /Kota		Won osob o	12 PAS							

	PROGRA M PENANG ANAN BENCAN A		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		Won osob o								
	<i>Perlindun gan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupate n/Kota</i>		<i>Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</i>		Won osob o								
	Penyedia an Makanan		Jumlah Orang yang Mendapat kan Permakan an 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat		Won osob o	korban bencan a							

			(Pengungsi an) Kewenang an Kabupaten /Kota										
	Penyedia an Sandang		Jumlah Orang yang Mendapat kan Pakaian dan Kelengkap an Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) dan Pasca Bencana Kewenang an Kabupaten		Won osob o	korban bencan a							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik		wonoso								
	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>		<i>Cakupan penyelenggaraan penataan desa</i>		wonoso	desa							
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		wonoso	desa							

	PROGRA M PENING KATAN KERJA SAMA DESA		Persentas e Badan Kerjasam a Antar Desa (BKAD) yang terbentuk				Otonom i fiskal daerah		Pening katan pemba nguna n sumbe r daya manus ia yang produ ktif, berkua litas dan berkep ribadia n denga n tersedi anya akses pendid ikan dan keseha tan	Sobo asri lestari bangu n desa lestari mbang un desa nata kutha			
	<i>Fasilitas i Kerja Sama antar Desa</i>		<i>Cakupan Kerjasam a Antar Desa yang difasilita si</i>		<i>won osob o</i>	<i>desa</i>	<i>Riset Potensi Daerah secara berkala berbasi s Potensi</i>			<i>penge mbang an kawas an perdes aan mergo</i>			

[illegible]

	Fasilitasi Pembang unan Kawasan Perdesaa n		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangu nan Kawasan Perdesaan		won osob o	desa	ya		ya	ya			
	PROGRA M ADMINIS TRASI PEMERI NTAHAN DESA		Persentas e BUMDes berbadan hukum Persentas e BUMDes berkemba ng dan maju Persentas e keterwaki lan perempua n di pemerinta h desa Persentas e desa berkinerja baik		won osob o	desa		penang gulang an kemisk inan	Pening katan pemba nguna n sumbe r daya manus ia yang produ ktif, berkua litas dan berkepr ibadia n denga n tersedi anya akses pendid ikan dan keseha tan		pening katan SDM yang produk tif, berkual itas dan berkepr ibadian denng an tersedi anya aksesp endidik an dan kesehat an		

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan	wonoso	desa								
--	--	--	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

	Fasilitasi Penyelen- garaan Administ- rasi Pemerint- ahan Desa		Jumlah Dokumen Penyeleng- garaan Administ- rasi Pemerinta- han Desa		won osob o	desa		ya	ya		ya		
	Fasilitasi Penyusu- nan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusun- an Produk Hukum Desa		won osob o	desa		ya	ya		ya		
	Fasilitasi Penyusu- nan Perencan- aan Pembang- unan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusun- an Perencana- an Pembangu- nan Desa		won osob o	desa		ya	ya		ya		
	Fasilitasi Pengelola- an Keuanga- n Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaa- n		won osob o	desa		ya	ya		ya		

[illegible]

	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		won osob o	desa		ya	ya		ya		
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		won osob o	desa		ya	ya		ya		
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		won osob o	desa		ya	ya		ya		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan		won osob o	desa							

			Kapasitas										
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		won osob o	desa							
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		won osob o	desa							

	PROGRA M PEMBER DAYAAN LEMBAG A KEMASY ARAKAT AN, LEMBAG A ADAT DAN MASYAR AKAT HUKUM ADAT		-								peningk atan SDM yang produkt if, berkuali tas dan berkepr ibadian denng an tersedia nya aksespe ndidika n dan kesehat an		
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Lembaga Kemasyarakatan desa aktif melakukan kegiatan pemberdayaan</i>		won osob o	desa								
---	--	--	------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Wonosobo	desa						ya		
--	---	--	---	--	----------	------	--	--	--	--	--	----	--	--

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Bab III, Bab IV Rancangan Awal Renja Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Tahun 2027 ini menjabarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan rencana kerja ini harus konsisten dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinsos PMD dan mengacu pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam **Permendagri Nomor 90 Tahun 2019** dan pemutakhirannya.

Renja Tahun 2027 difokuskan untuk mendukung Arah Kebijakan Tahunan, yaitu **Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan desa/kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan akselerasi layanan.**

Kerangka pendanaan memuat seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja. Perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Rencana program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan dalam enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, selapan belas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pemerintahan pilihan dan lima unsur pendukung urusan pemerintahan, urusan penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan non urusan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka urusan Sosial merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, sedangkan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berikut adalah Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Wonosobo

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2028	
									Lo ka si	Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu indikatif	su mb er da na		Target Capaian kinerja	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	0 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	1	0 6	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKPD							

	1	0	0	2.		Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaa n dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu			20.000.000				20.000.0 00
	1	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah		5 dok	10.000.000			5 dok	10.000.0 00
	1	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 dok	10.000.000			5 dok	10.000.0 00
	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			5.000.000.0 00				5.000.00 0.000
	1	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	5.000.000.0 00			12	5.000.00 0.000

[illegible]

	1	0	0	2.	0	Penyediaan		Jumlah		12				12	
	6	1	0	0	0	Barang		Paket			40.000.000				
			6	0	0	Cetakan dan		Barang							
				6	5	Penggandaan		Cetakan							
								dan							
								Penggandaan yang							
								Disediakan							
	1	0	0	2.	0	Penyediaan		Jumlah		12				12	
	6	1	0	0	0	Bahan		Dokumen			4.000.000				
			6	0	0	Bacaan dan		Bahan							4.000.00
				6	6	Peraturan		Bacaan dan							0
						Perundang-		Peraturan							
						undangan		Perundang-							
								undangan							
								yang							
								Disediakan							
	1	0	0	2.	0	Penyelenggar		Jumlah		120				120	
	6	1	0	0	0	aan Rapat		Laporan			200.000.000				
			6	0	0	Koordinasi		Penyelengga							200.000.
				6	9	dan		raan Rapat							000
						Konsultasi		Koordinasi							
						SKPD		dan							
								Konsultasi							
								SKPD							
	1	0	0	2.		Pengadaan		Persentase							
	6	1	0	7		Barang		Realisasi							
						Milik		belanja							
						Daerah		pengadaan							
						Penunjang		barang							
						Urusan		milik							
						Pemerintah		daerah							

[illegible]

	1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Persentase realisasi belanja Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah							
	1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12bulan , 2 lokasi	5.000.000			12bulan , 2 lokasi	5.000.00 0
	1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12bulan , 2 lokasi	60.000.000			12bulan , 2 lokasi	60.000.0 00
	1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	900.000.000			12	900.000. 000

[illegible]

	1	0	0	2.	0	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	2 gedung	200.000.000			2 gedung	200.000. 000
4	1	0	0			PROGRAM PEMBERDA YAAN SOSIAL	Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri Rasio penerima program usaha produktif laki- laki : perempuan Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandiria n ekonomi						

	1	0	0	2.		Pemberday aan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Cakupan pemberday aan sosial KAT yang terfasilitas i kegiatan (pendampi ngan, pelatihan, peningkat an kapasitas)		40	600.000.00 0			40	600.000. 000
	1	0	0	2.	0	Fasilitasi		Jumlah		50	500.000.000			50	500.000. 000
	6	6	2	0	0	Pemberdaya		Keluarga							
				1	0	an Sosial		pada KAT							
				1	0	KAT		yang							
					1			Mendapatk							
								an Fasilitas							
								Pemberdaya							
								an Sosial							
								Kewenanga							
								n							
								Kabupaten/							
								Kota							
	1	0	0	2.	0	Peningkatan		Jumlah		40	100.000.000			40	100.000. 000
	6	6	2	0	0	Kapasitas		Keluarga							
				1	0	dan		pada KAT							
				2	0	Pendamping		yang							
					2	an KAT		Meningkat							
								Kapasitasny							
								a							
								Kewenanga							
								n							
								Kabupaten/							

[illegible]

[illegible]

						Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan sosial bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda duda perintis kemerdekaan		Jumlah warakawuri /keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial		25	75.000.000			25	75.000.000
	1	0	0	2.	0	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/		2	50.000.000			2	50.000.000

							Kota							
						peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan kabupaten/ kota	jumlah penyeluruh sosial, penyuluh sosial masyarakat , pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya		30	75.000.000			30	75.000.000

[illegible]

5	1	0	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial							
	1	0	0	2.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial			1.325.000.000				1.325.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	1	0	0	2.	0	Pemberian		Jumlah	350			350			
	6	4	0	0	0	Bimbingan		Peserta		200.000.000				200.000.000	
			1	0	0	Sosial		Bimbingan							
				6	6	kepada		Sosial							
						Keluarga		kepada							
						Penyandang		Keluarga							
						Disabilitas		Penyandang							
						Terlantar,		Disabilitas							
						Anak		Terlantar,							
						Terlantar,		Anak							
						Lanjut Usia		Terlantar,							
						Terlantar,		Lanjut Usia							
						serta		Terlantar,							
						Gelandanga		serta							
						n Pengemis		Gelandanga							
						dan		n Pengemis							
						Masyarakat		dan							
								Masyarakat							
								Kewenanga							
								n							
								Kabupaten/							
								Kota							

	1	0	0	2.	0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota		75	50.000.000			75	50.000.000
	1	0	0	2.	0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota		30	100.000.000			30	100.000.000

	1	0	0	2.	0	Pemberian		Jumlah		50				50	
	6	4	0	0	0	Layanan		Orang yang		50.000.000				50.000.0	
			1	0	0	Data dan		Mendapatk						00	
				9		Pengaduan		an Layanan							
								Data dan							
								Pengaduan							
								Kewenanga							
								n							
								Kabupaten/							
								Kota							
	1	0	0	2.	0	Pemberian		Jumlah		20				20	
	6	4	0	0	0	Layanan		Orang yang		70.000.000				70.000.0	
			1	1	1	Kedaruratan		Mendapatk						00	
				0				an							
								Pelayanan							
								Kedarurata							
								n							
								Kewenanga							
								n							
								Kabupaten/							
								Kota							
	1	0	0	2.	0	Pemberian		Jumlah		50				50	
	6	4	0	0	0	Pelayanan		Orang yang		30.000.000				30.000.0	
			1	1	1	Penelusuran		Mendapatk						00	
				1		Keluarga		an							
								Pelayanan							
								Penelusura							
								n Keluarga							
								Kewenanga							
								n							
								Kabupaten/							
								Kota							

	1	0	0	2.	0	Pemberian		Jumlah		30				30	
		6	4	0	0	Layanan		Orang			50.000.000				50.000.0
				1	1	Rujukan		Mendapatk							00
					2			an Layanan							
								Rujukan							
								Kewenanga							
								n							
								Kabupaten/							
								Kota							
	1	0	0	2.		Rehabilitas		Persentase							
		6	4	0		i Sosial		PMKS							
				2		Penyandan		bukan							
						g Masalah		korban							
						Kesejahtera		HIV/AIDS							
						an Sosial		dan NAPZA							
						(PMKS)		yang							
						Lainnya		mendapatk							
						Bukan		an							
						Korban		layanan							
						HIV/AIDS		rehabilitasi							
						dan NAPZA		sosia							
						di Luar									
						Panti Sosial									
	1	0	0	2.	0	Pemberian		Jumlah		25				25	
		6	4	0	0	Bimbingan		Peserta			120.000.000				120.000.
				2	0	Fisik,		Bimbingan							000
					7	Mental,		Fisik,							
						Spiritual,		Mental,							
						dan Sosial		Spiritual							
								dan Sosial							
								Kewenanga							
								n							

[illegible]

6	1	0	0			PROGRAM PERLINDUN GAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS Persentase KPM PKH graduasi Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial Persentase perangkat daerah yang memanfaat kan data DTKS							
	1	0	0	2.		<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten</i>			<i>7.075.000. 000</i>				<i>7.075.00 0.000</i>
	1	0	0	2.	0	Pendataan		Jumlah		479809	250.000.000			479809	250.000. 000
		6	5	0	0	Fakir Miskin		Fakir							
				2	0	Cakupan		Miskin							
				1	0	Daerah		Cakupan							
						Kabupaten/ Kota		Daerah							
						Kota		Kabupaten/							

[illegible]

	1	0	0	2.	0	Fasilitasi Bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatk an Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarakat Kewenanga n Kabupaten/ Kota	15	175.000.000			15	175.000. 000
7	1	0	0			PROGRAM PENANGAN AN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat						
	1	0	0	2.		<i>Perlindung an Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</i>						

	1	0	0	2.	0	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		100	100.000.000			100	100.000.000
	1	0	0	2.	0	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		75	30.000.000			75	30.000.000

[illegible]

	1	0	0	2.	0	Pelayanan		Jumlah		20				20	
	6	6	0	0	0	Dukungan		Korban			30.000.000				30.000.0
				1	0	Psikososial		Bencana							00
					5			yang							
								Mendapatk							
								an Layanan							
								Dukungan							
								Psikososial							
								Kewenanga							
								n							
								Kabupaten/							
								Kota							
	1	0	0	2.		<i>Penyelengga</i>		<i>Cakupan</i>							
	6	6	0	0		<i>raan</i>		<i>penyelengg</i>							
				2		<i>Pemberdaya</i>		<i>araan</i>							
						<i>an</i>		<i>pemberdaya</i>							
						<i>Masyarakat</i>		<i>an</i>							
						<i>Terhadap</i>		<i>masyarakat</i>							
						<i>Kesiapsiaga</i>		<i>terhadap</i>							
						<i>an Bencana</i>		<i>kesiapsiaga</i>							
						<i>Kabupaten/</i>		<i>an bencana</i>							
						<i>Kota</i>									
	1	0	0	2.	0	Koordinasi,		Jumlah		4				4	
	6	6	0	0	0	Sosialisasi		Orang yang			80.000.000				80.000.0
				2	0	dan		Melaksanak							00
					2	Pelaksanaan		an							
						Taruna		Koordinasi,							
						Siaga		Sosialisasi							
						Bencana		dan							
								Pelaksanaa							
								n Taruna							
								Siaga							
								Bencana							
								Kewenanga							

							n Kabupaten/ Kota							
8	1	0	0			PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kelengkapa n makam pahlawan dalam kondisi baik							
	1	0	0	2. 0 1		<i>Pemelihara an Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan pemelihar aan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota</i>			350.000.00 0				350.000. 000
	1	0	0	2. 0 1	0 0 0 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaa an Sarana dan Prasarana		125 paket	100.000.000			125 paket	100.000. 000

[illegible]

	2	1 3				URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDA YAAN MASYARAKA T DAN DESA									
9	2	1 3	0 2			PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik							
	2	1 3	0 2	2. 0 1		<i>Penyelengg araan Penataan Desa</i>		<i>Cakupan penyelengg araan penataan desa</i>		4	350.000.00 0			4	350.000. 000
	2	1 3	0 2	2. 0 1	0 0 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		4	350.000.000			4	350.000. 000
1 0	2	1 3	0 3			PROGRAM PENINGKAT AN KERJA SAMA DESA		Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk							

[illegible]

1 1	2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase BUMDes berbadan hukum Persentase BUMDes berkembangan dan maju Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa Persentase desa berkinerja baik								
--------	---	--------	--------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

								<i>desa yang menyampa ikan laporan penyelengg araan pemerinta han kepada masyaraka t tepat waktu</i>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2	1	0	2.	0	Fasilitasi Penyelenggar aan Administrasi Pemerintah an Desa		Jumlah Dokumen Penyelengga raan Administras i Pemerintah an Desa		236	100.000.000			236	100.000. 000
	2	1	0	2.	0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusuna n Produk Hukum Desa		4	30.000.000			4	30.000.0 00
	2	1	0	2.	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusuna n Perencanaa n Pembangun an Desa		236	50.000.000			236	50.000.0 00
	2	1	0	2.	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan		15	3.000.000.0 00			15	3.000.00 0.000

								Desa							
						Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		jumlah aparatur pemerintah an desa yang mendapat peningkata n kapasitas		250	150.000.000			250	150.000.000
	2	1	0	2.	0	Pembinaan dan Pemberdaya an BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdaya an BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		15	75.000.000			15	75.000.000
	2	1	0	2.	0	Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhenti an Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelengga raan Pemilihan, Pengangkat an dan		46	2.000.000.000			46	2.000.000.000

[illegible]

[illegible]

1 2	2	1 3	0 5		PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT		-								
	2	1 3	0 5	2. 0 1	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/		Cakupan Lembaga Kemasyarak atan desa aktif melakukan kegiatan pemberdaya an								

[illegible]

2	1	0	2.	0	Fasilitasi	Jumlah	3				3	
3	5	0	0	0	Penataan,	Dokumen		100.000.000				100.000.000
		1	0	0	Pemberdaya	Hasil						
			2	2	an dan	Penataan,						
					Pendayagun	Pemberdaya						
					aan	an dan						
					Kelembagaa	Pendayagun						
					n Lembaga	aan						
					Kemasyarak	Kelembagaa						
					atan	n Lembaga						
					Desa/Kelura	Kemasyarak						
					han (RT,	atan						
					RW, PKK,	Desa/Kelur						
					Posyandu,	ahan (RT,						
					LPM, dan	RW, PKK,						
					Karang	Posyandu,						
					Taruna),	LPM, dan						
					Lembaga	Karang						
					Adat	Taruna),						
					Desa/Kelura	Lembaga						
					han dan	Adat						
					Masyarakat	Desa/Kelur						
					Hukum Adat	ahan dan						
						Masyarakat						
						Hukum						
						Adat						

	2	1	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelur ahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelur ahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatka n Kapasitasny a		5	100.000.000			5	100.000. 000
	2	1	0	2.	0	Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan n Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengemban gan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan							

							an Pendapatan Asli Desa								
	2	1	0	2.	0	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaata n Teknologi Tepat Guna		2	100.000.000			2	100.000. 000
	2	1	0	2.	0	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahteraa n Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelengga raan Gerakan Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahtera n Keluarga		15	500.000.000			15	500.000. 000

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan dokumen ini adalah implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029, dan bertujuan untuk menjabarkan program dan kegiatan tahunan yang efektif dan terukur.

Secara garis besar, Renja Tahun 2027 ini dirancang untuk mencapai Tujuan Strategis Perangkat Daerah, yaitu: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Kelompok Rentan, Meningkatnya kemandirian dan kemajuan desa serta Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah. Kontribusi Dinsos PMD difokuskan pada dukungan terhadap Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, yaitu Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Produktif, Berkualitas Dan Berkepribadian.

Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas, lengkap dengan indikator kinerja dan pagu pendanaan indikatif, yang harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam *Asta Cita* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.

5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut (Saran)

Sebagai Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dokumen ini masih bersifat sementara dan memerlukan tindak lanjut serta penyempurnaan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang berlaku:

1. **Sinkronisasi dan Harmonisasi:** Rancangan Awal Renja Dinsos PMD Tahun 2027 ini harus dijadikan bahan dasar untuk dibahas, disinkronkan, dan diselaraskan dengan seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam **Forum Perangkat Daerah**. Hal ini untuk memastikan tidak adanya duplikasi program dan memastikan dukungan terintegrasi terhadap sasaran daerah.
 2. **Penyempurnaan Anggaran:** Hasil dari Forum Perangkat Daerah akan digunakan untuk mengoperasionalkan pagu indikatif menjadi pagu definitif dan menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam penyusunan **Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan R-APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2027.
 3. **Kepatuhan Regulasi:** Perlu dipastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang disepakati menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya **Permendagri Nomor 90 Tahun 2019** dan pemutakhirannya, untuk memudahkan proses penganggaran dan input data ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 4. **Pedoman Pengendalian dan Evaluasi:** Dokumen Renja PD Tahun 2027 yang telah final akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinsos PMD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus menjadi **tolak ukur untuk menilai capaian kinerja** penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi dasar evaluasi kinerja secara periodik.
- Diharapkan dengan kepatuhan terhadap Renja ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo di tahun 2027 dapat berjalan secara

akuntabel dan terukur, yang secara nyata mendukung Visi Kabupaten Wonosobo.

